

Selesaikan Rekomendasi BPK



PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan perbaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan setempat yang telah memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah daerah.

"Kita semua harus menaatinya serta menjalankan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk batas waktu yang telah diberikan oleh BPK untuk

memperbaiki rekomendasi laporan keuangan negara pemerintah kabupaten/kota," kata Cornelis, Rabu (23/2).

Cornelis menegaskan, jika peraturan tersebut tidak di jalankan terlebih lagi mengenai keuangan maka saat di audit BPK tentunya pemerintah setempat dan berakibat menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran tersebut. "Kalau tidak dijalankan, yang pasti kita akan merasa takut," jelas Cornelis.

Oleh sebab itu, Cornelis meminta kepada pemerintah kabupaten/kota agar mempertanggungjawabkan semua penggunaan uang negara dan jangan sampai mencari alasan untuk menghindari masalah ini karena sampai kapan pun tidak akan tenang dan yang pasti selalu dihantui rasa bersalah. "Kalau sudah salah tidak akan bisa

■ Bersambung ke Hal 15

Gubernur: Selesaikan Rekomendasi BPK

Sambungan Hal. 9

lari lagi kita harus tanggung jawab," tegas Cornelis.

Gubernur menambahkan, dirinya tidak punya kepentingan dengan kepala daerah sehingga menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, BPK Perwakilan Kalbar memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu untuk memperbaiki laporan keuangan negara terkait rekomendasi yang dikeluarkan badan tersebut.

"Kalau dalam batas waktu

selama 30 hari mendatang, pemerintah kabupaten/kota tidak memperbaiki itu, maka akan kami serahkan pada penegak hukum," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo.

Ia menjelaskan, sebelum mengeluarkan batas waktu memperbaiki rekomendasi BPK terhadap pengelolaan laporan keuangan negara, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalbar, Selasa (22/2) diundang untuk sosialisasi kebijakan tersebut.

Kepala BPK Perwakilan

Kalbar mengatakan, hingga kini tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang sesuai oleh pemerintah daerah masih sedikit yakni 47 persen dari 4.313 rekomendasi dari tahun 2004 sampai semester II 2010. "Hampir separuh saja rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut," katanya.

Ia mengungkapkan, dari 15 entitas di Kalbar yang dipantau BPK RI, hanya tiga yang prestasinya baik dalam tindak lanjut rekomendasi tersebut. Yakni Kabupaten Sambas (83 persen), Landak (74 persen)

dan Pemerintah Kota Singkawang (73 persen). Ia tidak memungkiri masih banyak yang belum mencapai 50 persen, malah ada yang di bawah itu.

Selama kurun waktu tersebut, terdapat 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi dari BPK RI Kalbar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sebanyak 2.047 rekomendasi sudah sesuai dengan tindak lanjut. Sedangkan 1.299 rekomendasi belum sesuai tindak lanjut, 967 rekomendasi belum ditindaklanjuti. (ant)